

MAKALAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK

Dosen Pengampu

- 1. Dr. Pujiati., S.P.d., M.Pd.**
- 2. Mega Metalia, SE, M.Si., MSAk., Ak**
- 3. Fiarika Dwi Utari, S.Pd., M.Pd.**



Disusun Oleh

Kelompok 2

Igha Mawardhani

2313031043

Intan Romala Sari

2313031051

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS PERGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

PRAKATA

Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-nya yang telah memungkinkan penulis untuk menyusun makalah yang berjudul “Akuntansi Manajemen Sektor Publik” dengan tepat pada waktunya.

Proses penyusunan makalah tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan, namun dengan bantuan dari berbagai pihak segala kesulitan itu dapat teratasi. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu dalam proses penyusunan makalah ini.

Penulis sadar bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi penyusunan maupun materi yang disajikan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik konstruktif dari pembaca untuk memperbaiki dan menyempurnakan makalah ini di masa mendatang. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 8 September 2025

Kelompok 2

DAFTAR ISI

PRAKATA	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan.....	2
BAB II PEMBAHASAN.....	3
2.1 Definisi dan Tujuan Akuntansi Manajemen Sektor Publik	3
2.2 Peran Akuntansi Manajemen Sektor Publik	4
2.3 Pengendalian Akuntansi Manajemen Sektor Publik	7
2.4 Peranan Teknologi Dalam Akuntansi Manajemen Sektor Publik.....	9
BAB III PENUTUP.....	10
3.1 KESIMPULAN	10
3.2 SARAN	10
DAFTAR PUSTAKA.....	11
STUDI KASUS.....	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor publik memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penyediaan barang dan jasa publik. Dalam pengelolaannya, sektor publik tidak hanya dituntut untuk menjalankan fungsi pelayanan, tetapi juga memastikan akuntabilitas serta penggunaan sumber daya yang efektif, efisien, dan transparan. Untuk mendukung hal tersebut, dibutuhkan sistem informasi akuntansi yang mampu memberikan data yang relevan, akurat, dan dapat dijadikan dasar dalam proses perencanaan, penganggaran, pengendalian, hingga evaluasi kinerja.

Akuntansi manajemen sektor publik hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut. Melalui penerapannya, organisasi publik dapat menyusun strategi yang tepat, melakukan penilaian biaya, menentukan tarif pelayanan, hingga mengukur kinerja secara objektif. Selain itu, akuntansi manajemen juga mendukung terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran publik sehingga setiap keputusan yang diambil benar-benar sejalan dengan kepentingan masyarakat luas.

Perkembangan teknologi juga semakin memperkuat peran akuntansi manajemen sektor publik. Penggunaan sistem berbasis teknologi memungkinkan organisasi publik untuk meminimalkan risiko, menekan biaya, sekaligus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, akuntansi manajemen sektor publik bukan hanya sekadar alat administratif, melainkan instrumen strategis yang mampu mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan akuntansi manajemen sektor publik serta tujuan penerapannya?
2. Bagaimana peran akuntansi manajemen sektor publik dalam mendukung perencanaan, pengendalian, dan evaluasi organisasi publik?
3. Bagaimana penerapan pengendalian akuntansi manajemen dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja sektor publik?
4. Apa peranan teknologi dalam memperkuat sistem akuntansi manajemen sektor publik?

1.3 Tujuan

1. Untuk Menjelaskan definisi serta tujuan akuntansi manajemen sektor publik.
2. Untuk Menguraikan peran akuntansi manajemen sektor publik dalam menunjang fungsi manajemen organisasi.
3. Untuk Menganalisis bentuk pengendalian akuntansi manajemen yang diterapkan pada sektor publik.
4. Untuk Mengidentifikasi peran teknologi dalam mendukung efektivitas akuntansi manajemen sektor publik.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Definisi dan Tujuan Akuntansi Manajemen Sektor Publik

Pengertian akuntansi manajemen dalam sektor publik menggabungkan pengertian akuntansi manajemen dan pengertian sektor publik. Menurut Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) akuntansi manajemen adalah proses identifikasi, pengukuran, akumulasi, analisis, penyusunan, interpretasi, dan komunikasi informasi yang digunakan oleh manajemen untuk merencanakan, mengevaluasi, dan pengendalian dalam suatu entitas dan untuk memastikan sesuai dan akuntabilitas penggunaan sumber daya tersebut. Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik sering didefinisikan sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik. Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen. Kompleksitas sektor publik tersebut menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen lebih bervariasi. Demikian juga bagi stakeholder sektor publik, mereka membutuhkan informasi yang lebih bervariasi, handal, dan relevan untuk pengambilan keputusan.

Keberadaan sektor publik merupakan bagian dari pemenuhan hak publik yaitu berupa pelayanan publik dan produk barang berupa barang publik. Selain itu, sektor publik merujuk pada organisasi publik (terutama pemerintah), yaitu organisasi yang menggunakan dana masyarakat dengan tujuan utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, tugas dan tanggung jawab akuntan pada sektor publik adalah menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi maupun kebutuhan pihak eksternal. Pengertian akuntansi manajemen sektor publik mempelajari bagaimana membuat informasi akuntansi yang relevan dan handal yang ditujukan pada pimpinan pada sektor publik dengan maksud untuk perencanaan dan pengendalian. Perencanaan diarahkan kepada hal yang bersifat perencanaan strategi, pemberian informasi, penilaian investasi, dan penganggaran, penentuan biaya pelayanan, penilaian kinerja. Serta pengendalian dijelaskan dalam bentuk pengukuran pencapaian kinerja manajemen dengan cara pencapaian target yang sesuai dengan program

yang sudah direncanakan. Tujuan dari perencanaan dan pengendalian tersebut yang nantinya akan dijadikan sebagai indikator dalam implementasi akuntansi manajemen sektor publik (Hantono. dkk, 2021).

Tujuan akuntansi manajemen sektor publik pada dasarnya tidak terlepas dari upaya dari memperbaiki kinerja manajemen dan meningkatkan akuntabilitas internal yang berdampak kepada masyarakat. Pemerintah menetapkan tiga tujuan untuk akuntansi manajemen sektor publik, yaitu:

1. Menetapkan prasyarat untuk memantau keuangan pemerintah
2. Mendistribusikan sumber daya sesuai dengan prioritas publik
3. Menciptakan efisiensi yang baik saat menggunakan sumber daya negara

Selain itu, tujuan akuntansi manajemen sektor publik adalah untuk menyediakan informasi agar dapat dilakukan pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. Pengaruh ketiga aspek tersebut sangat besar pada organisasi sektor publik. Sehingga dengan adanya akuntansi manajemen seluruh kegiatan dalam organisasi sektor publik dapat dikelola dengan baik. (Lakharis Inuzula, 2021)

2.2 Peran Akuntansi Manajemen Sektor Publik

Akuntansi manajemen sektor publik sangat dibutuhkan dalam pengelolaan organisasi sektor publik. Akuntansi manajemen memberikan tidak hanya informasi jenis-jenis laporan keuangan, tetapi juga informasi tujuan laporan keuangan secara keseluruhan. Penerapan akuntansi manajemen sektor publik merupakan langkah untuk mengelola semua sumber daya dalam organisasi. Akuntansi manajemen sektor publik dibutuhkan untuk menjamin tujuan organisasi yang telah diterapkan bisa tercapai. Fokus utama akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Informasi akuntansi diberikan sebagai alat atau sarana untuk membantu menjalankan fungsi-fungsi manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Fungsi manajemen seperti perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian dan pengendalian tidak dapat dilakukan tanpa informasi yang memadai. Akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik

berperan dalam merencanakan strategi, memberikan informasi biaya, penilaian investasi, penganggaran, penentuan biaya pelayanan dan tarif pelayanan serta penilaian kinerja.

1. Perencanaan Strategi

Pada tahapan perencanaan strategi, manajemen memberikan dan menyusun beberapa alternatif program yang dapat mendukung strategi yang efektif bagi organisasi. Peran akuntansi manajemen adalah memberikan informasi untuk menentukan berapa biaya program (*cost of program*) dan biaya suatu aktivitas (*cost of activity*) sehingga berdasarkan informasi akuntansi tersebut dapat menentukan berapa anggaran yang dibutuhkan dikaitkan dengan sumber daya yang dimiliki. Untuk memberikan jaminan dialokasikannya sumber daya input secara ekonomis, efisien, dan efektif, maka diperlukan informasi akuntansi manajemen yang akurat, relevan, dan handal untuk menghitung besarnya biaya program, aktivitas, atau proyek. Sistem informasi akuntansi manajemen yang baik dapat mengurangi peluang terjadinya pemborosan, kebocoran dana, dan mendeteksi program-program yang tidak layak secara ekonomi.

Keandalan sistem informasi akuntansi manajemen sangat penting dimiliki seiring dengan adanya paradigma baru organisasi pemerintah yang lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat dan kepentingan publik. Akuntansi manajemen sektor publik sangat erat dengan proses pemilihan program, penentuan biaya, dan manfaat program serta penganggaran. Akuntansi manajemen sektor publik juga berfungsi untuk memfasilitasi dihasilkannya anggaran sektor publik yang efektif, efisien, dan ekonomis (Mardiasmo, 2018).

2. Pemberian Informasi Biaya

Pada tahapan pemberian informasi biaya, informasi akuntansi manajemen hendaknya dapat mendeteksi sumber pemborosan yang masih berpotensi untuk diefisiensikan serta mencari metode atau teknik terbaik untuk menghemat biaya.

Akuntansi manajemen sektor publik memiliki peran yang strategis dalam perencanaan finansial terkait dengan identifikasi biaya-biaya yang terjadi.

Akuntansi manajemen sektor publik membutuhkan *cost accounting* untuk pengambilan keputusan biaya. Akuntansi biaya pada sektor publik berperan untuk memberikan informasi mengenai pengeluaran publik yang dapat digunakan oleh pihak internal dan pihak eksternal untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Peran akuntansi manajemen dalam pemberian informasi biaya meliputi penentuan klasifikasi biaya, biaya apa saja yang masuk dalam kategori biaya rutin (*recurrent expenditure*) dan biaya modal (*capital expenditure*), *controllable* dan *uncontrollable*, biaya tetap dan variabel, dan lainnya. Informasi akuntansi manajemen diharapkan dapat membantu dalam menentukan dan melaporkan biaya.

3. Penilaian Investasi

Pada tahapan penilaian investasi ini untuk menilai kelayakan investasi secara ekonomi dan finansial. Akuntansi manajemen diperlukan dalam penilaian investasi karena untuk dapat menilai investasi diperlukan identifikasi biaya, risiko, dan manfaat atau keuntungan dari suatu investasi. Faktor yang harus diperhatikan akuntan manajemen adalah tingkat diskonto, tingkat inflasi, tingkat risiko dan ketidakpastian (*country risk* dan *political risk*), dan sumber pendanaan untuk investasi yang akan dilakukan. Untuk memudahkan, dapat digunakan analisis efektifitas biaya (*cost-effectiveness analysis*). Penilaian investasi dengan menggunakan analisis efektivitas biaya menekankan seberapa besar dampak (*outcome*) yang dicapai dari suatu proyek atau investasi dengan biaya tertentu.

4. Penganggaran

Pada tahapan penganggaran akuntansi manajemen sektor publik diharapkan mampu berperan dalam memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang lebih efektif terkait dengan 3 fungsi anggaran antara lain alat alokasi sumber daya publik, distribusi, serta stabilitas. Karena itulah akuntansi manajemen menjadi tools dalam pengalokasian serta pendistribusian sumber dana publik kepada masyarakat secara tepat, efisien, adil, serta merata.

5. Penentuan Biaya Pelayanan dan Tarif Pelayanan

Pada tahapan penentuan biaya pelayanan dan tarif pelayanan, akuntansi manajemen digunakan untuk menentukan berapa biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan tertentu dan berapa tarif yang akan dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan publik, termasuk menghitung subsidi yang diberikan. Penentuan biaya pelayanan (*cost of services*) dan penentuan tarif (*charging for service*) merupakan satu rangkaian yang keduanya sama-sama membutuhkan informasi akuntansi. Sebagai contoh, pemerintah daerah harus dapat menentukan berapa biaya untuk membangun terminal bus atau stasiun kereta api yang tertib, aman dan nyaman serta biaya operasionalnya. Berdasarkan informasi tersebut pemerintah setempat dapat menentukan berapa tarif pelayanan yang akan dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan terminal atau stasiun kereta api tersebut. Perusahaan air minum milik pemerintah daerah harus dapat mengidentifikasi biaya-biaya apa saja yang terjadi di perusahaan, sehingga berdasarkan informasi biaya tersebut dapat ditentukan tarif harga per meter kubik kepada pelanggannya dan dapat dilakukan efisiensi agar perusahaan tidak merugi.

6. Penilaian Kinerja

Pada tahapan penilaian kinerja, akuntansi manajemen berperan dalam pembuatan indikator kinerja kunci dan satuan ukur untuk masing-masing aktivitas yang dilakukan. Penilaian kinerja merupakan bagian dari sistem pengendalian. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

2.3 Pengendalian Akuntansi Manajemen Sektor Publik

Pengendalian manajemen sektor publik sebagai pihak yang bertugas mengendalikan dan mengawasi organisasi agar mencapai tujuan dan menghindarkannya dari kesalahan atau kegagalan. Tentu saja, kegagalan itu bisa terjadi karena fungsi manajemen itu sendiri tidak berjalan sebagaimana mestinya

Pengendalian manajemen sektor publik yang ada di Indonesia ini diterapkan dalam beberapa kelompok, diantaranya

1. Pengendalian Preventif

Pengendalian dilakukan sebelum berjalannya proses manajemen sehingga meminimalisir kesalahan dan merencanakan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi tersebut dirumuskan dalam bentuk program-program kerja yang harus diselesaikan dan mencapai tujuan-tujuan jangka pendek yang dicanangkan. Perencanaan yang detil akan sangat membantu organisasi beroperasi dengan minim kesalahan dan hal ini tentu saja berdampak pada efektivitas serta efisiensi kerja.

2. Pengendalian Operasional

Pengendalian ini merupakan waktu saat manajemen melakukan pengawasan terkait pelaksanaan atau operasional organisasi, yaitu dalam bentuk berjalannya program-program kerja yang disusun. Alat pengawasan pada pengendalian ini adalah anggaran yang dibuat di awal tahun kerja untuk setiap program kerja yang dibuat. Anggaran dana ini akan menjadi alat yang menghubungkan antara perencanaan dengan pengendalian.

3. Pengendalian Kinerja

Jika program kerja sudah diselesaikan atau organisasi telah mencapai tahun akhir kerja, maka manajemen melakukan tipe pengendalian kinerja melalui penilaian program kerja dan bagaimana kinerja orang-orang dalam organisasi tersebut. Evaluasi terhadap kinerja tahun terkait bisa berdasarkan poin-poin yang sudah dicapai pada setiap program kerja yang sudah direncanakan dari awal atau dibandingkan dengan kinerja tahun lalu sebagai standarnya.

Perencanaan dan pengendalian pada dasarnya merupakan dua sisi dari mata uang yang sama sehingga keduanya harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Tanpa pengendalian, perencanaan tidak akan berarti karena tidak ada tindak lanjut untuk mengidentifikasi apakah rencana organisasi telah dicapai. Namun sebaliknya, tanpa ada perencanaan maka pengendalian tidak akan berarti karena tidak ada target atau rencana yang digunakan sebagai pembanding (Lakharis Inuzula, 2021).

2.4 Peranan Teknologi Dalam Akuntansi Manajemen Sektor Publik

Perkembangan teknologi telah membawa dampak dalam kehidupan masyarakat. Kebutuhan terhadap efisiensi waktu dan biaya menyebabkan setiap organisasi baik profit dan non-profit merasa perlu menerapkan teknologi dalam lingkungan kerja. Umumnya penerapan teknologi dalam sistem informasi organisasi memiliki beberapa peranan sebagai berikut:

- Meminimalkan risiko
- Mengurangi biaya
- Penambahan nilai
- Menciptakan realitas baru.

Teknologi tentu dapat membantu penerapan akuntansi manajemen pada sektor publik. Akuntansi pada sektor publik merupakan suatu sistem akuntansi yang digunakan oleh lembaga publik. Setiap lembaga publik tentunya mendapatkan tuntutan dari masyarakat agar pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan. Karakteristik akuntansi pada sektor publik ini berfokus pada dua hal. *Pertama*, akuntansi untuk sektor publik berfokus pada sifat lembaga. Jadi, sifat akuntansi ini adalah khusus organisasi non profit yang tidak menghasilkan laba. Misalnya seperti lembaga pemerintahan. *Kedua*, akuntansi untuk sektor publik berfokus pada tujuan lembaga. Sesuai namanya, akuntansi untuk sektor publik hanya menyediakan informasi pelayanan pada publik. Pelayanan untuk publik ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Indra & Handayani, 2022).

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Akuntansi manajemen sektor publik merupakan bagian penting dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik. Perannya tidak hanya sebatas mencatat transaksi, tetapi juga menyediakan informasi yang relevan untuk perencanaan, penganggaran, pengendalian, serta evaluasi kinerja. Melalui penerapannya, sektor publik dapat mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan transparan sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas kepada masyarakat. Selain itu, akuntansi manajemen membantu pemerintah maupun lembaga publik dalam menetapkan strategi, menentukan biaya pelayanan, menilai investasi, hingga mengukur kinerja organisasi. Perkembangan teknologi turut memperkuat fungsinya dengan menghadirkan sistem informasi yang lebih cepat, akurat, dan hemat biaya. Hal ini membuktikan bahwa akuntansi manajemen sektor publik tidak hanya berfungsi secara administratif, melainkan juga sebagai alat strategis untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pelayanan publik.

3.2 SARAN

Bagi pemerintah dan lembaga publik, penerapan akuntansi manajemen perlu terus ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi digital agar informasi yang disajikan lebih transparan, akurat, dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pemangku kepentingan. **Bagi masyarakat**, diharapkan dapat lebih aktif dalam mengawasi serta memberikan masukan terhadap pengelolaan keuangan publik, sehingga tercipta transparansi dan rasa percaya terhadap lembaga pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Chartered Institute of Management Accountants. (2005). *Official Terminology*. CIMA Publishing.
- Hantono, Lakharis. dkk. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Indra, B., & Handayani, T. (2022). Peranan Teknologi Informasi dalam Penguatan Akuntansi Sektor Publik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 9(1), 88–97.
- Kurniawati, A. (2020). Implementasi e-Budgeting dalam Mewujudkan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (Studi di Pemerintah Kota Surabaya). *Jurnal Akuntansi Publik*, 8(2), 55–67. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/aj/article/view/1348>
- Lakharis Inuzula, S. E., & CA, A. (2021). *Akuntansi Manajemen Sektor Publik*. *Akuntansi Sektor Publik*, 21.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.

STUDI KASUS

Implementasi Sistem *e-Budgeting* di Pemerintah Kota Surabaya

Pemerintah Kota Surabaya menerapkan sistem *e-Budgeting* sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sistem ini dirancang agar seluruh proses penganggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dapat dilakukan secara elektronik dan dapat diakses oleh publik. Sebelum *e-Budgeting* diterapkan, penganggaran masih bersifat manual dan rentan terjadi ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi anggaran. Bahkan, sering muncul kritik dari masyarakat terkait adanya potensi penyalahgunaan dana serta kurangnya transparansi.

Setelah penerapan *e-Budgeting*, Adapun manfaat yang terlihat bagi masyarakat seperti, Proses penganggaran menjadi lebih cepat dan terdokumentasi dan juga Informasi keuangan dapat diakses publik, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Namun, beberapa kendala juga muncul, di antaranya tidak semua pegawai memahami penggunaan sistem sehingga masih ada kesalahan input data, dan Infrastruktur internet di beberapa kecamatan kurang memadai sehingga akses sistem terhambat.

Pertanyaannya

1. Bagaimana peran akuntansi manajemen sektor publik dalam mendukung keberhasilan penerapan *e-Budgeting*?
2. Menurut Anda, kendala apa yang paling krusial dari kasus di atas, dan bagaimana cara mengatasinya?
3. Apakah penerapan teknologi seperti *e-Budgeting* otomatis menjamin terciptanya transparansi dan akuntabilitas? Mengapa demikian?
4. Bagaimana strategi pemerintah agar SDM sektor publik mampu beradaptasi dengan sistem akuntansi manajemen berbasis teknologi?